

Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 6 Salatiga Menggunakan *Discrepancy Evaluation Model (DEM)*

Ulya SetyaNingsih¹, Mawardi², Bambang Ismanto³
aulyasteani@gmail.com¹, mawardi@staff.uksw.edu², bambang.ismanto@uksw.edu³
Magister Administrasi Pendidikan^{1,3}, Pendidikan Guru Sekolah Dasar²
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga^{1,2,3}

The Evaluation of the School Operational Subsidy Program at SMP Negeri 6 Salatiga Using The Discrepancy Evaluation Model (DEM)

ABSTRACT

This is an evaluation study for the School Operational Subsidy (SOS) program at SMP Negeri 6 Salatiga to identify the aspects of the design, installation, process, product, and cost benefit analysis. Using the Discrepancy Evaluation Model (DEM), the subjects who participated were school committee members, school principals, treasurers, teachers and parents. The instruments were interview sheets, observation guidelines, and document study guidelines. The data analysis was done with percentage and categorical techniques. The results showed that: 1) in the design aspect, there was a 5% average gap between the standards set and the actual conditions of the program implementation, in very low category; 2) in the installation aspect, there was 0% or no gap between the standards set and the reality that occurs empirically; 3) in the process aspect, there was an average gap of 4%, in very low category; 4) in the product aspect, there was an average gap of 13%, in very low category; and 5) aspects of the cost benefit analysis, there was an average gap of 11% in very low category.

Keywords: *Evaluation, School Operational Subsidy (SOS) Program, Discrepancy Evaluation Model (DEM)*

Article Info

Received date: 28 Maret 2021

Revised date: 29 April 2021

Accepted date: 19 Mei 2021

PENDAHULUAN

Dewasa ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus meningkatkan capaian program wajib belajar 12 tahun, mulai jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (SD-SMP-SMA/SMK) yang telah dicanangkan sejak tahun 2015. Untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun ini, pemerintah melanjutkan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah dimulai sejak tahun 2005, kemudian meneruskan dengan meluncurkan program pendanaan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) agar masyarakat mendapatkan pendidikan gratis (Kemdikbud, 2020). Program-program yang telah dicanangkan dan ditetapkan pemerintah tersebut merupakan salah satu cara dalam mempermudah pada akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi yang mengalami keterbatasan pada sektor ekonomi maupun kesulitan karena faktor geografis.

Berkaitan dengan program dana BOS, yang akan dikaji dalam penelitian ini, sampai dengan tahun 2020, dana yang diluncurkan pemerintah setiap tahun mengalami kenaikan. Munculnya program BOS ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya bagi yang kurang mampu, sehingga diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik lagi dan memperbaiki kehidupan di keluarganya. Menurut Juknis Program BOS tahun 2020, yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang mengatur penggunaan dana BOS pada masa pandemi Covid-19 kemudian diganti dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 berlaku mulai bulan April 2020. Saat ini penyaluran dana BOS diberikan dalam tiga tahapan, dimana masing tahap memiliki persentase yang berbeda-beda yaitu tahap pertama 30%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga adalah 30%. Dana BOS diterima langsung oleh setiap sekolah baik negeri maupun swasta kemudian

dana yang diterima lalu ditransfer langsung kepada rekening masing-masing sekolah. (Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Data akhir tahun 2019, tercatat sudah ada 27 sekolah menengah pertama yang sudah menerima alokasi dana BOS baik negeri maupun swasta di Kota Salatiga dan bermanfaat untuk mendukung program peningkatan mutu sekolah. Namun, disisi lain banyak sekolah yang merasa bahwa program BOS ini membatasi ruang gerak sekolah dalam mengembangkan suatu program yang telah direncanakan berdasarkan pengalokasian biaya tertentu, sehingga dana yang diberikan hanya bisa untuk biaya operasional sekolah. Alternatif solusinya, sekolah melakukan berbagai upaya pembiayaan sumber lain secara mandiri untuk pembiayaan pendidikan seperti meningkatkan sarpras, sumber daya manusia, pembayaran honor guru, peningkatan mutu pembelajaran, dan lain-lain. Upaya tersebut merupakan salah satu cara untuk berinvestasi pada sektor pendidikan melalui pembiayaan pendidikan. Akses pembiayaan pada pendidikan saat ini menjadi hal yang sering dikhawatirkan masyarakat karena mereka menganggap untuk memperoleh pendidikan harus membayar dengan harga mahal. (Ismanto, 2016).

Kebijakan BOS ini dapat menepis stigma masyarakat sebelumnya adanya biaya mahal Pendidikan dasar. Program dana BOS berkontribusi besar pada pendanaan pendidikan sehingga dapat membantu masyarakat khususnya bagi yang kurang mampu. Alokasi dana BOS yang telah diberikan pemerintah kemudian di salurkan kepada masing-masing sekolah dengan harapan dapat meningkatkan mutu pembelajaran khususnya di kota Salatiga. SMP Negeri 6 Salatiga merupakan salah satu sekolah yang menerima dana BOS yang telah diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2005. Wawancara yang telah dilakukan kepada kepala sekolah menjelaskan bahwa dana BOS yang diberikan pemerintah selalu turun tepat waktu dan alokasi dana yang diberikan sudah sesuai dengan jumlah peserta didik, kemudian dalam rapat untuk membahas agenda BOS melibatkan kepala sekolah dewan guru, bendahara BOS, komite sekolah, dan perwakilan orang tua peserta didik.

Studi awal yang telah dilakukan peneliti pada SMP Negeri 6 Salatiga, mendapatkan hasil bahwa dana program BOS yang digunakan kemudian dibuatkan laporan lalu ditempel pada dinding sekolah supaya orang tua peserta didik mengetahui dana yang diberikan oleh pemerintah diperuntukkan apa saja, sehingga masyarakat dapat melihat secara transparan pengelolaan dan pelaporannya yang dilakukan sekolah. Penegasan dari Kepala sekolah pada penggunaan dana BOS sudah optimal namun belum maksimal karena masih dibatasi dengan Juknis, sehingga jika ada biaya yang tidak bisa di cover oleh sekolah maka meminta bantuan dengan ketua komite sekolah bahkan orang tua peserta didik, terutama biaya dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Kendala yang dihadapi sekolah pada saat ini adalah pada sektor sarpras, media, dan alat pembelajaran pada masa pandemi Covid-19, sebab membutuhkan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran *online* yang lebih untuk pemakaian koneksi internet, pemasangan wifi, biaya operasional, dan berlangganan aplikasi zoom.

Dalam rangka memetakan bagaimana implementasi program dana BOS dengan berbagai variannya, diperlukan sebuah kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga penelitian evaluatif terhadap implementasi program dana BOS pada sekolah-sekolah penerima di Kota Salatiga perlu dilakukan. Dengan kegiatan penelitian ini dapat dipetakan bagaimana kinerja pengelola, keterlaksanaan program berdasarkan Juknis yang ditetapkan, serta kendala-kendala yang muncul, sehingga dapat direkomendasikan rencana kerja dan tindaklanjutnya (RKTL). Berkaitan dengan implementasi penggunaan dana BOS masih memiliki kendala yang dirasakan oleh sekolah baik dari proses pelaksanaan maupun rancangan yang dibuat hal ini didukung dengan penelitian. Sebuah penelitian tentang evaluasi program BOS jenjang SD, menemukan bahwa adanya kesenjangan terhadap pelaksanaan dana BOS dengan petunjuk teknis dari pemerintah (Rubiyati & Ismanto, 2020). Kemudian penelitian lain dari dengan judul "*The Challenge Of School Operational Assistance Management in Elementary School*" menemukan hasil terdapat kendala dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah dasar sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 03 tahun 2019 mengenai Juknis penggunaan dana BOS (Hadiyanto & Wiyono, 2019). Tidak semua elemen sekolah terlibat dalam penggunaan dana BOS sehingga masih ada kekurangan dalam pengawasan programnya, perlu adanya peningkatan mengenai pengelolaan dana BOS agar lebih transparan dan akuntabel melalui *e-budgeting*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebuah penelitian menemukan bahwa dana BOS yang diberikan berdampak positif untuk sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan sehingga meningkatkan prestasi dan etos kerja sekolah (Sumarini, 2014).

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut di atas, bahwa peruntukan dana BOS untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, gambaran awal implementasi program dana BOS, kendala-kendala yang muncul yang didukung hasil penelitian, maka diperlukan penelitian yang bersifat konfirmatori dengan topik Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada SMP Negeri 6 Salatiga dengan menggunakan model *Discrepancy Evaluation Model (DEM)*. Tujuannya untuk mengenal secara pasti bagaimana kondisi kesenjangan aspek desain, instalasi, proses, produk dan analisis *cost benefit* (manfaat biaya) program BOS pada SMP Negeri 6 Salatiga.

KAJIAN PUSTAKA

Program dana BOS merupakan program pemerintah yang dasarnya untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, namun ada beberapa pembiayaan yang diperbolehkan dengan dibiayai BOS. Program ini dimulai sejak bulan Juli 2005 untuk program wajib belajar selama 9 tahun, secara khusus program BOS bertujuan untuk :1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih, 2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta (Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Lebih lanjut dalam Juknis BOS 2020 dijelaskan bahwa implementasi pencairan dana program BOS diberikan kepada sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS). Rambu-rambunya, sebagai berikut: 1) sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RAKS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RAKS tersebut; 2) penyusunan Rencana Jangka Menengah dan RAKS harus didasarkan hasil evaluasi diri sekolah; dan 3) Rencana Jangka Menengah dan RAKS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh SKPD pendidikan kabupaten/kota. Rambu-rambu pencairan dana BOS seperti ini berarti bahwa penetapan alokasi BOS memperhatikan kebutuhan sekolah dan besarnya disesuaikan jumlah peserta didik.

Berangkat dari RKAS yang telah disusun, selanjutnya dibuat RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) untuk satu tahun pelajaran. Di dalam perancangan RAPBS inilah dana BOS dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan yang diadakan. Jika program dana BOS ini dikaitkan dengan BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin), penerimanya harus diseleksi ketat oleh dewan guru agar pengalokasiannya tepat sasaran yaitu kepada peserta didik yang orang tuanya kurang mampu. Namun sayangnya pada pelaporan dana Bos ini ada beberapa sekolah yang masih tertutup sehingga masyarakat khususnya orang tua tidak mengetahui dana BOS dipergunakan untuk apa saja. Banyak asumsi yang timbul di masyarakat bahwa sekolah gratis yang dibantu dengan biaya BOS itu tidak sepenuhnya gratis, melainkan harus ada pembayaran tambahan yang diberikan kepada sekolah. Dengan demikian tugas sekolah seharusnya mengevaluasi dan menjelaskan kepada masyarakat supaya asumsi mereka terhadap sekolah gratis berbasis BOS menjadi lebih jelas, sehingga cara berfikir dan cara pandang mereka bisa berubah, karena dana BOS yang diberikan berdampak positif untuk sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan sehingga meningkatkan prestasi dan etos kerja sekolah.

Evaluasi merupakan bentuk pengawasan terhadap program BOS, mulai dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaannya sehingga dapat mengetahui apakah sudah memenuhi tujuan yang ditetapkan atau belum. Evaluasi program merupakan alat yang digunakan untuk meningkatkan pengelolaan dan manfaat dari program BOS (Wirawan, 2011). Dengan dilakukan evaluasi ini diharapkan dapat mengukur tujuan dari suatu program. Evaluasi hakikatnya ialah suatu cara untuk menilai keberhasilan dari suatu program yang telah dilaksanakan (Arikunto, 2010). Sejalan dengan pendapat tersebut, bahwa evaluasi program sebagai langkah untuk supervisi dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu dan kemudian melakukan analisis (Mahmudi, 2011). Dari berbagai

pemikiran ini, evaluasi menjadi penting dan strategis untuk mengetahui tingkat pelaksanaan dan menetapkan alternative pemecahan masalah program tahapan berikutnya.

Salah satu model dalam mengevaluasi suatu program dengan menggunakan model *Discrepancy Evaluation Model* yang berfokus pada perbandingan hasil evaluasi dengan standar yang telah ditentukan, kemudian hasil evaluasi digunakan sebagai pengambilan kebijakan mengenai program yang dilakukan. Model Evaluasi *Discrepancy Evaluation Model (DEM)* merupakan salah satu dari model-model evaluasi program. Model-model tersebut mencakup: *Goal Oriented Evaluation Model* dikembangkan oleh Tyer; *Goal Free Evaluation Model* dikembangkan oleh Scriven; *Formatif-Sumatif Evaluation Model* dikembangkan oleh Scriven; *Countenance Evaluation Model* dikembangkan oleh Stake; *Reponsive Evaluation Model* dikembangkan oleh Stake; *CSE-USLA Evaluation Model*; *CIPP Evaluation Model* dikembangkan oleh Stufflebeam; dan *Discrepancy Evaluation Model (DEM)* dikembangkan oleh Provus (Jaedun, 2010). Dari beberapa model evaluasi program masing-masing memiliki karakteristik tersendiri pada setiap evaluasi dan tahapan yang dimilikinya. Penelitian yang dilakukan ini akan mengevaluasi suatu program menggunakan model evaluasi *Discrepancy Evaluation Model (DEM)* atau sering disebut model evaluasi kesenjangan. Pemilihan model ini disebabkan karena terdapat kesesuaian antara bidang yang akan dievaluasi dengan model evaluasinya, sehingga dengan penggunaan model kesenjangan ini peneliti dapat memperoleh data akurat mengenai kesenjangan berdasarkan peristiwa yang terjadi pada obyek penelitian. Selain melihat kesenjangan, peneliti ingin mengukur ketercapaian dari suatu program yang telah dijalankan apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan perbaikan atau rekomendasi dari suatu program agar menjadi lebih baik. Provus menjelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menyepakati pada kriteria-kriteria kemudian menentukan apakah ada kesenjangan antara kriteria yang telah ditetapkan sehingga hasil yang diperoleh dapat meningkatkan mutu atau program. Selain itu Provus juga menjelaskan dengan adanya evaluasi kesenjangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai kekurangan dan kelebihan berdasarkan standar yang ditetapkan.

Kriteria yang dibuat digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana berjalannya suatu program apakah sudah tercapai tujuannya ataupun belum. Pada proses ini evaluator membantu untuk menjelaskan mengenai kriteria dan pencapaian sehingga diharuskan memahami secara tepat dan jelas perihal apa yang akan dievaluasi dalam menetapkan standar. Evaluasi kesenjangan memberikan jalan keluar untuk mengidentifikasi setiap kelemahan yang ditimbulkan secara nyata dilapangan serta mencari jalan keluar untuk dijadikan tolak ukur. Pada evaluasi program dengan menggunakan DEM memiliki empat tahapan kegiatan sesuai dengan program yang akan dievaluasi, yaitu a) Desain, berisi tujuan, sasaran dan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; b) Instalasi, memfokuskan pada isi atau subtansi program, cara, metode, mekanisme agar dapat mencapai tujuan; c) Proses, fokusnya evaluator berupaya untuk memperoleh data mengenai kemajuan program; d) Produk, fokus pada hasilnya, apakah tujuan akhir suatu program sudah tercapai atau belum; dan e) Analisis manfaat biaya, menganalisis manfaat dari ketercapaian program sehingga hasil yang dicapai dibandingkan dengan tujuan agar dapat merekomendasi atas keberlanjutan program apakah akan menghentikan, mengganti/revisi, atau meneruskannya. Kemudian keputusan dapat berupa revisi program atau melanjutkan program kegiatan.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif, yang bertujuan untuk mengevaluasi program BOS pada SMP Negeri 6 Salatiga. Penelitian evaluasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan efektivitas kebijakan atau program yang telah dilaksanakan. Penelitian evaluasi ini merupakan evaluasi program yang didalamnya memuat suatu isu atau masalah yang harus diidentifikasi (Sugiyono, 2013). Model evaluasi yang dipilih adalah model *Discrepancy Evaluation Model (DEM)*, untuk menganalisis ada tidaknya kesenjangan suatu program jika dibandingkan dengan standar tertentu, dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan. Model evaluasi kesenjangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis 5 aspek model DEM yaitu desain, instalasi, proses, produk dan analisis manfaat biaya. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 6 Salatiga. Subyek penelitian sebagai sumber melibatkan kepala sekolah, komite sekolah, bendahara sekolah BOS, guru, dan orang tua peserta didik SMP Negeri 6 Salatiga. Instrumen yang dipergunakan dalam pengambilan data adalah lembar wawancara, observasi dan studi dokumen. Instrumen yang digunakan sebagai instrumen utama dalam

penelitian adalah lembar pedoman wawancara. Lembar wawancara ini terdiri dari 39 item pertanyaan yang mencakup desain, instalasi, proses, produk dan analisis manfaat biaya Validasi data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data, yang terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, bendahara BOS, guru dan orang tua siswa, serta triangulasi teknik, dengan cara menggunakan instrumen pendukung, berupa lembar observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik persentase dan kategoris. Data hasil wawancara disusun dalam suatu tabel induk, kemudian dipersentasekan dan dikategorikan berdasarkan frekuensi dan tingkat kesenjangannya, menggunakan skala berikut: a) tingkat kesenjangan 1% - 20% = sangat rendah; b) 21% - 40% = rendah; c) 41% - 60% = cukup; d) 61% - 80% = tinggi; dan d) 81% -100% = sangat tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kemendikbud (2015) menjelaskan bahwa implementasi program BOS yang diberikan oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Pada bagian terdahulu telah diuraikan bahwa Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 6 Salatiga ini menggunakan model *Discrepancy Evaluation Model (DEM)*. Berdasarkan model *DEM* ini, evaluasi dikelompokkan menjadi 5 aspek, yaitu evaluasi aspek desain, instalasi, proses, produk, dan analisis manfaat biaya. Berikut uraian kesenjangan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 6 Salatiga dari masing-masing aspek.

Pada aspek desain, analisis hasil wawancara terhadap 6 responden tentang kesenjangan aspek desain untuk setiap komponen, mencakup komponen hakikat dan penggunaan dana program BOS, tujuan, sasaran dan besaran dana dipaparkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rerata *Discrepancy* Aspek Desain Program BOS

No	Komponen	Standar (%)	Data Empirik (%)	Kesenjangan (%)
1	Hakikat dan penggunaan dana program BOS	100	100	0
2	Tujuan	100	100	0
3	Sasaran	100	100	0
4	Besaran dana	100	80	20
Rerata		100	95%	5%

Keterangan kesenjangan: a) 1%-20%= sangat rendah; b) 21%-40%= rendah; c) 41%-60%= cukup; d) 61%-80%= tinggi; dan d) 81%-100%= sangat tinggi.

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa rerata tingkat kesenjangan (*discrepancy*) data yang diperoleh di lapangan pada tahap desain terhadap program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai 5%. Data kesenjangan ini menunjukkan kategori sangat rendah. Artinya bahwa hampir tidak ada kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan kenyataan yang terjadi secara empirik. Dengan kata lain kinerja aspek desain pada SMP Negeri 6 Salatiga dalam merancang penggunaan dana BOS sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kesenjangan di dalamnya. Dari 4 komponen aspek desain, yaitu komponen hakikat dan penggunaan dana program BOS, tujuan, sasaran, dan besaran dana BOS, hanya komponen terakhir besaran dana BOS yang memiliki kesenjangan sebesar 20%.

Pada aspek instalasi Program BOS, analisis hasil wawancara tentang kesenjangan aspek instalasi untuk setiap komponen, mencakup komponen 1) penggunaan dana BOS diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran; 2) kondisi pandemi covid-19 penggunaan dana BOS membantu sekolah; 3) kebutuhan BOS menjadi terdeteksi melalui program BOS; dan 4) RKAS dibuat sesuai dengan juknis BOS, dipaparkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rerata *Discrepancy* Aspek Instalasi Program BOS

No	Komponen	Standar (%)	Data Empirik (%)	Kesenjangan (%)
1	Penggunaan dana BOS diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran	100	100	0

No	Komponen	Standar (%)	Data Empirik (%)	Kesenjangan (%)
2	Kondisi pandemi covid-19 penggunaan dana BOS membantu sekolah	100	100	0
3	Kebutuhan BOS menjadi terdeteksi melalui program BOS	100	100	0
4	RKAS dibuat sesuai dengan juknis BOS	100	100	0
Rerata		100	100%	0%

Keterangan kesenjangan: a) 1%-20%= sangat rendah; b) 21%-40%= rendah; c) 41%-60%= cukup; d) 61%-80%= tinggi; dan d) 81%-100%= sangat tinggi.

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa rerata tingkat kesenjangan (*discrepancy*) pada aspek instalasi berkaitan dengan implementasi program BOS sebesar 0%. Artinya sama sekali tidak ada kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan kenyataan yang terjadi secara empirik. Dengan kata lain kinerja aspek instalasi pada SMP Negeri 6 Salatiga dalam merancang penggunaan dana BOS sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kesenjangan di dalamnya. Dari 4 komponen aspek instalasi, yaitu; 1) penggunaan dana BOS diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, Usman (2006) mendefinisikan mengenai mutu ialah proses untuk memperbaiki dan menghasilkan suatu output melalui pengembangan pendidikan.; 2) kondisi pandemi covid-19 penggunaan dana BOS membantu sekolah; 3) kebutuhan BOS menjadi terdeteksi melalui program BOS; dan 4) RKAS dibuat sesuai dengan juknis BOS, semuanya tidak ada kesenjangan.

Pada aspek proses Program BOS, analisis hasil wawancara terhadap 6 responden tentang kesenjangan aspek proses untuk setiap komponen, mencakup komponen: 1) Pelaksanaan program BOS; 2) Pencairan dana BOS; 3) Pengawasan dana BOS; 4) Tingkat partisipasi; dan 5) Orang tua memberikan respon positif pada program BOS, dipaparkan dalam tabel 3.

Tabel 3. Rerata *Discrepancy* Aspek Proses Program BOS

No	Komponen	Standar (%)	Data Empirik (%)	Kesenjangan (%)
1	Pelaksanaan program BOS	100	100	0
2	Pencairan dana BOS	100	80	20
3	Pengawasan dana BOS	100	100	0
4	Tingkat partisipasi	100	100	0
5	Orang tua memberikan respon positif pada program BOS	100	100	0
Rerata		100	96%	4%

Keterangan kesenjangan: a) 1%-20%= sangat rendah; b) 21%-40%= rendah; c) 41%-60%= cukup; d) 61%-80%= tinggi; dan d) 81%-100%= sangat tinggi.

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa rerata tingkat kesenjangan (*discrepancy*) data yang diperoleh di lapangan pada aspek proses program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai 4%. Data kesenjangan ini menunjukkan kategori sangat rendah. Artinya bahwa hampir tidak ada kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan kenyataan yang terjadi secara empirik. Dengan kata lain kinerja aspek proses pada SMP Negeri 6 Salatiga dalam proses implementasi program dana BOS sudah berjalan dengan baik dan hampir tidak ada kesenjangan di dalamnya. Secara parsial, dari 5 komponen aspek proses, yaitu : 1) Pelaksanaan program BOS; 2) Pencairan dana BOS, Ismanto (2016) menjelaskan bahwa salah satu cara untuk berinvestasi pada sektor pendidikan melalui pembiayaan pendidikan; 3) Pengawasan dana BOS; 4) Tingkat partisipasi; dan 5) Orang tua memberikan respon positif pada program BOS, hanya komponen pencairan dana BOS yang memiliki kesenjangan sebesar 20%.

Analisis *Discrepancy* Aspek Produk Program BOS Analisis hasil wawancara terhadap 6 responden tentang kesenjangan aspek produk untuk setiap komponen, mencakup komponen: 1) hasil yang dicapai dari program BOS; 2) kendala yang muncul tidak sulit untuk diatasi; dan 3) evaluasi yang dilaksanakan efektif dan berhasil mendukung perbaikan, dipaparkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Rerata *Discrepancy* Aspek Produk Program BOS

No	Komponen	Standar (%)	Data Empirik (%)	Kesenjangan (%)
1	Hasil yang dicapai dari program BOS	100	100	0
2	Kendala yang muncul tidak sulit untuk diatasi	100	80	20
3	Evaluasi yang dilaksanakan efektif dan berhasil mendukung perbaikan	100	80	20
Rerata		100	87%	13%

Keterangan kesenjangan: a) 1%-20%= sangat rendah; b) 21%-40%= rendah; c) 41%-60%= cukup; d) 61%-80%= tinggi; dan d) 81%-100%= sangat tinggi.

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa rerata tingkat kesenjangan (*discrepancy*) data yang diperoleh di lapangan pada aspek proses program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai 13%. Data kesenjangan ini menunjukkan kategori sangat rendah. Artinya bahwa hampir tidak ada kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan kenyataan yang terjadi secara empirik. Dengan kata lain kinerja aspek proses pada SMP Negeri 6 Salatiga dalam proses implementasi program dana BOS sudah berjalan dengan baik dan hampir tidak ada kesenjangan di dalamnya. Secara parsial, dari 3 komponen aspek proses, yaitu: 1) hasil yang dicapai dari program BOS; 2) kendala yang muncul tidak sulit untuk diatasi; dan 3) evaluasi yang dilaksanakan efektif dan berhasil mendukung perbaikan. Secara parsial ada dua komponen yaitu kendala yang muncul tidak sulit untuk diatasi serta evaluasi yang dilaksanakan efektif dan berhasil mendukung perbaikan, masing-masing memiliki kesenjangan sebesar 20%.

Pada aspek analisis manfaat biaya, hasil wawancara tentang kesenjangan aspek analisis manfaat biaya untuk setiap komponen, mencakup komponen: 1) sekolah dan orang tua peserta didik terbantu dengan program BOS; 2) program BOS sudah efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran; dan 3) kegiatan operasional sekolah berjalan lancar dengan adanya program BOS, dipaparkan dalam Tabel 4.5.

Tabel 5. Rerata *Discrepancy* Aspek Analisis Manfaat Biaya Program BOS

No	Komponen	Standar (%)	Data Empirik (%)	Kesenjangan (%)
1	Sekolah dan orang tua peserta didik terbantu dengan program BOS	100	67	33
2	Program BOS sudah efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	100	100	0
3	Kegiatan operasional sekolah berjalan lancar dengan adanya program BOS	100	100	0
Rerata		100	89%	11%

Keterangan kesenjangan: a) 1%-20%= sangat rendah; b) 21%-40%= rendah; c) 41%-60%= cukup; d) 61%-80%= tinggi; dan d) 81%-100%= sangat tinggi.

Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa rerata tingkat kesenjangan (*discrepancy*) data yang diperoleh di lapangan pada aspek analisis manfaat biaya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai 11%. Data kesenjangan ini menunjukkan kategori sangat rendah. Artinya bahwa hampir tidak ada kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan kenyataan yang terjadi secara empirik. Dengan kata lain kinerja aspek analisis manfaat biaya pada SMP Negeri 6 Salatiga dalam proses implementasi program dana BOS sudah berjalan dengan baik dan hampir tidak ada kesenjangan di dalamnya. Meskipun demikian, secara parsial, dari 3 komponen aspek analisis manfaat biaya, yaitu: 1) sekolah dan orang tua peserta didik terbantu dengan program BOS; 2) program BOS sudah efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran; dan 3) kegiatan operasional sekolah berjalan lancar dengan adanya program BOS, ada satu komponen, yaitu komponen sekolah dan orang tua peserta didik terbantu dengan program BOS memiliki kesenjangan sebesar 33%.

Data secara parsial tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja aspek analisis manfaat biaya pada SMP Negeri 6 Salatiga terdapat kesenjangan di dalamnya, meskipun pada kategori rendah (33%). Kesenjangan tersebut pada deskriptor “setelah program BOS ini diterapkan, keadaan sosial dan

ekonomi orang tua peserta didik menjadi lebih baik” , hal tersebut diperkuat dengan argumen dari Bendahara BOS menjelaskan bahwa dana BOS ini tidak memberikan pengaruh pada keadaan sosial dan ekonomi orang tua peserta didik. Selain itu Ketua Komite pada saat dilakukan wawancara yang menyatakan bahwa dana BOS yang diberikan oleh pemerintah tidak memberikan pengaruh pada keadaan sosial dan ekonomi namun setidaknya dapat membantu orang tua peserta didik dalam meringankan biaya pendidikan. Orang tua peserta didik pertama menjelaskan bahwa tingkat perkonomian dan ekonomi menjadi baik berdasarkan pola manajemen masing-masing sehingga dana BOS ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Pembahasan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis *discrepancy* yang terjadi antara pelaksanaan dengan juknis atau kondisi normatif yang seharusnya dilakukan pada pelaksanaan program BOS di SMP N 6 Salatiga. Berdasarkan kajian teori, evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi yang berguna untuk membuat penilaian terhadap kelayakan sebuah program termasuk perencanaan, implementasi hingga hasil suatu program. Evaluasi program adalah sebuah cara untuk memperoleh informasi untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi sebuah program, untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi yang kemudian diambil keputusan sesuai kebijakan program. Sehingga dalam penelitian ini, informasi di dapat dari hasil wawancara dari berbagai sumber, dari hasil observasi dan studi dokumen, kemudian dilihat kesenjangannya. Hasil analisis *discrepancy* yang diperoleh digunakan untuk menilai kelayakan, efektifitas, efisiensi, dan ketercapaian program BOS dalam pemenuhan standar kinerja sekolah. Berikut pembahasan hasil penelitian berdasarkan data *discrepancy* yang telah ditemukan dalam penelitian evaluasi ini, sesuai dengan tahapan atau aspeknya.

Analisis *discrepancy* aspek desain program BOS menemukan bahwa rerata tingkat kesenjangan (*discrepancy*) aspek desain mencakup komponen hakikat dan penggunaan dana BOS, tujuan, sasaran, dan besaran dana BOS di SMP Negeri 6 Salatiga mencapai 5%, berada pada kategori sangat rendah. Artinya kinerja aspek desain pada SMP Negeri 6 Salatiga dalam merancang penggunaan dana BOS sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kesenjangan di dalamnya, meskipun secara parsial dari 4 komponen desai, ada komponen “besaran dana BOS” yang memiliki kesenjangan sebesar 20%. Artinya responden menyatakan bahwa belum sepenuhnya komponen “besaran dana BOS” didesain dengan baik, meskipun dalam kategori rendah (hanya sebagian kecil saja). Hasil evaluasi aspek desain ini membuktikan bahwa hampir semua deskriptor aspek desain terlaksana dengan baik. Artinya: 1) warga sekolah sudah memahami secara keseluruhan panduan program BOS yang diberikan oleh pemerintah; 1) rumusan tujuan pokok dari program BOS sudah sesuai dengan panduan yang diberikan pemerintah; 3) dalam perencanaan semua peserta didik menjadi sasaran dari program BOS; 4) dalam perencanaan dana BOS yang diterima peserta didik Rp.1.100.000,- dalam satu tahunnya sesuai panduan; 5) dalam program sekolah, nampak bahwa program BOS terprogram mendukung program pendidikan di sekolah; 6) pihak sekolah memegang kendali penuh dalam mengambil tindakan penetapan dan penggunaan dana BOS; 7) perencanaan penggunaan dana BOS dalam pembelajaran pada masa pandemi Covid -19 optimal, terlihat dari proram pembelajarannya; 8) perencanaan dana BOS digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembelajaran, nampak dari program anggaran; dan 9) perencanaan dana BOS sangat berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan sekolah, terlihat dari program sekolah yang menunjukkan aloksi dana yang berasal dari dana BOS. Dengan demikian dapat direkomendasikan bahwa program implementasi program BOS di SMP Negeri 6 Salatiga dapat diteruskan dan ditingkatkan, terutama pada aspek besaran dana. Hasil penelitian ini sejalan dengan Juknis BOS tahun 2020 bahwa pengertian atau definisi program BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan pokok program ini adalah untuk biaya operasional sekolah bagi peserta didik, meringankan beban biaya operasional sekolah, dan membebaskan pungutan peserta didik yang orangtuanya tidak mampu. Demikian juga temuan ini sudah sejalan dengan PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Kajian lebih jauh menemukan bahwa implementasi BOS juga digunakan untuk menunjang peningkatan mutu sekolah. Hal ini tercermin pada tujuan umum BOS yaitu selain meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, BOS juga sangat berperan dalam mempercepat pencapaian SPM dan SNP. Sekolah telah memahami bahwa dana BOS merupakan sumber dana utama dalam menunjang SPM. Sebagai sumber dana utama dalam pencapaian SPM maka harus digunakan semaksimal mungkin melalui perwujudan program-program yang bermutu dan tentunya di dukung oleh

SDM yang memadai. Simpulan penelitian bahwa penggunaan dana BOS sesuai dengan Juknis BOS diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Sumarini tentang Efektifitas Dana BOS terhadap Peningkatan Mutu di Madrasah mendapatkan hasil bahwa pengolaan dana BOS sudah efektif sebab dilihat dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi (Sumarini, 2014). Kemudian pada peningkatan mutu Madrasah ditemukan dari naiknya status akreditasi yang diperoleh, jumlah siswa semakin meningkat, siswa yang mengalami ketertinggalan kelas mengalami penurunan serta angka putus sekolahpun menurun. Selain itu peningkatan prestasi yang ditorehkan peserta didik mengalami peningkatan seperti dalam memenangkan lomba sehingga dana BOS mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik dan kualitas etos kerja sekolah. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Sumarsyah tentang Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Tahun 2019-2020 di Kecamatan Lubuk Basung menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan operasional sekolah pada tingkat sekolah dasar sudah berjalan dengan baik (Sumarsyah, 2020).

Analisis aspek instalasi menemukan bahwa rerata tingkat kesenjangan aspek instalasi yang mencakup penggunaan dana BOS diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, kondisi pandemi covid-19 penggunaan dana BOS membantu sekolah, kebutuhan BOS menjadi terdeteksi melalui program BOS, dan RKAS dibuat sesuai dengan juknis BOS sebesar 0%. Artinya responden menyatakan bahwa instalasi program BOS di SMP Negeri 6 Salatiga berjalan baik. Hasil evaluasi aspek instalasi ini membuktikan bahwa semua deskriptor aspek instalasi terlaksana dengan baik. Artinya deskriptor: 1) penggunaan dana BOS diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Hal ini nampak dari alokasi dana BOS dalam program peningkatan mutu pembelajaran; 2) dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini penggunaan dana BOS membantu sekolah, terutama nampak dalam alokasi dana untuk kegiatan pembelajaran daring; 3) dana yang digunakan sudah memenuhi kebutuhan khususnya pembelajaran; 4) banyak kebutuhan yang terdeteksi melalui program BOS; 5) Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dibuat sesuai dengan juknis BOS; dan 6) pembuatan RKAS melibatkan semua pihak sekolah sudah mengarah pada program sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian direkomendasikan program implementasi program BOS di SMP Negeri 6 Salatiga dapat diteruskan. Hasil penelitian evaluatif ini sejalan dengan Juknis BOS tahun 2020 bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dibuat dalam tim dan melibatkan semua pemangku kepentingan, diantaranya guru, bendahara, kepala sekolah dan komite. RKAS dibuat setiap awal tahun anggaran yaitu bulan Januari. Sehingga program sekolah jelas terencana, dimana RKAS dijadikan standar dalam kegiatan operasional program BOS di SMP Negeri 6 Salatiga.

Hal yang menarik adalah bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini, dana BOS juga diinstalasikan untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Sejalan dengan temuan penelitian ini, penelitian yang dilakukan Haji, Lian, Fitriani dengan tema penelitian *An Evaluation Of School Operational Fund Program*, menunjukkan hasil bahwa perencanaan program BOS dilakukan dengan pedoman RAPBS dengan penggunaannya sesuai dengan Juknis 2015, pertanggung jawaban akan penggunaan dana BOS dalam bentuk pembelian, pemeliharaan peralatan sekolah, pembayaran Honor guru, dan manfaat dari dampak program BOS bagi sekolah ialah pembelajaran yang berlangsung berjalan secara efektif dengan meningkatkan kualitas fasilitas yang ada (Haji, Lian, & Fitriani, 2020). Sependapat dengan penelitian sebelumnya, Wirawan yang melakukan penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan Kota Malang) mendapatkan hasil pada pelaksanaan kebijakan Program BOS telah berjalan sesuai dengan apa yang telah tertulis di Juknis dan masyarakat berkontribusi aktif dalam dalam proses pengawasan dan pemberian masukan pada program dana BOS (Wirawan M. , 2015). Hal tersebut juga sejalan dengan teori kebijakan oleh Edward bahwa faktor yang mempengaruhi efektifitas dan efisiensi dari implementasi kebijakan program adalah faktor sumber daya. Faktor sumber daya meliputi staf yang terdiri dari guru sebagai bendahara sekolah, kemudian kepala sekolah sebagai penanggungjawab dan juga komite sekolah.

Analisis aspek proses mencakup komponen pelaksanaan pada program BOS, pencairan, pengawasan dana BOS, tingkat partisipasi, dan orang tua memberikan respon positif pada program BOS di SMP Negeri 6 Salatiga menemukan kesenjangan sebesar 4% berada pada kategori sangat rendah. Artinya kinerja aspek proses pada SMP Negeri 6 Salatiga sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kesenjangan didalamnya, meskipun secara parsial dari 3 komponen produk, ada komponen “Kendala yang muncul tidak sulit untuk diatasi” serta “Evaluasi yang dilaksanakan efektif dan berhasil mendukung

perbaikan” yang memiliki kesenjangan masing-masing sejumlah 20%. Artinya responden menyatakan bahwa belum sepenuhnya komponen “Kendala yang muncul tidak sulit untuk diatasi” serta “Evaluasi yang dilaksanakan efektif dan berhasil mendukung perbaikan” diproses dengan baik, meskipun kategori yang dihasilkan masih dalam kategori rendah atau hanya sebagian kecil saja. Hasil evaluasi pada aspek produk ini membuktikan bahwa hampir semua deskripsi aspek produk terlaksanakan dengan baik. Artinya : 1) peserta didik mengalami kemajuan belajar setelah menerima dana BOS, terlihat dari rerata hasil belajar meningkat dari tahun sebelumnya; 2) sekolah merasa terbantu dengan adanya program BOS; 3) program BOS efektif dalam memenuhi mutu pembelajaran, hal ini nampak dari laporan kemajuan sekolah; 4) tidak banyak kendala dalam pelaksanaan program BOS disekolah terlihat dari pernyataan warga sekolah; 5) walaupun ada kendala dalam pelaksanaan program BOS segera dapat teratasi; 6) evaluasi yang dilaksanakan efektif dan berhasil mendukung perbaikan terlihat dari laporan monev dana BOS; 7) program BOS memberikan dampak positif; 8) dengan adanya program BOS ini, mutu pembelajaran menjadi lebih baik hal ini terlihat dari data peningkatan capaian pembelajaran para siswanya. Dengan demikian dapat direkomendasikan bahwa program implementasi program BOS di SMP Negeri 6 Salatiga dapat diteruskan dan ditingkatkan terutama pada aspek kendala yang muncul tidak sulit untuk diatasi serta evaluasi yang dilaksanakan efektif dan berhasil mendukung perbaikan. Hasil ini sejalan dengan Juknis BOS tahun 2020 yakni pada segi pembiayaan layanan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, layanan pendidikan berbayar bagi pendidik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dirumah, pembiayaan administrasi sekolah untuk pembelian alat kesehatan. Sehingga BOS memberikan dampak positif bagi sekolah dan peserta didik.

Kajian lebih jauh ditemukan bahwa implementasi BOS ditemukan bahwa pada aspek kendala yang muncul tidak sulit untuk diatasi tidak sejalan dengan apa yang ada, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah menuturkan bahwa “kebutuhan sekolah tidak tercover oleh dana BOS dan ada kendala tapi sedikit” sehingga sekolah harus pandai dalam memangemen setiap kebutuhan dengan mengelompokkan ke skala prioritas terlebih dahulu. Simpulan penelitian bahwa dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Juknis BOS diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Sumarini tentang Efektivitas Dana BOS terhadap Peningkatan Mutu di Madrasah mendapatkan hasil bahwa pengolaan dana BOS sudah efektif sebab dilihat dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian pada peningkatan mutu Madrasah ditemukan dari naiknya startus akreditasi yang diperoleh, jumlah siswa semakin meningkat, siswa yang mengalami ketertinggalan kelas mengalami penurunan serta angka putus sekolahpun menurun. Selain itu peningkatan prestasi yang ditorehkan peserta didik mengalami peningkatan seperti dalam memenangkan lomba sehingga dana BOS mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik dan kualitas etos kerja sekolah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Setyoko, Tunas, Sunaryo tentang *Evaluation of School Opeational Assistance by Using CIPP Model in Indonesia Private Islamic Elementary School* mendapatkan hasil program BOS sudah dalam kategori baik pada efektivitasnya selain itu masih diperluhkan sosialisasi program kegiatan secara rutin kepada seluruh warga pemangku kepentingan sekolah. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan Juknis yang telah diberikan oleh pemerintah, selain itu dana yang diberikan dapat membantu dan menunjang kegiatan belajar mengajar disekolah (Setyoko, Tunas, Sunaryo, 2016). Kemudian Soulisa meneliti tentang Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Negeri Kecamatan Palu Timur memperoleh hasil bahwa tujuan dari penggunaan dana BOS sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi pada pelayanan pendidikan agar menjadi lebih baik lagi (Soulisa, 2017).

Temuan peneliti bahwa rerata tingkan kesenjangan (*discrepancy*) aspek produk mencakup komponen : hasil yang dicapai dari program BOS; kendala yang muncul tidak sulit untuk diatasi; dan evaluasi yang dilaksanakan efektif dan berhasil mendukung perbaikan pada SMP Negeri 6 Salatiga mencapai 13% berada pada kategori sangat rendah. Artinya kinerja aspek proses pada SMP Negeri 6 Salatiga sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kesenjangan didalamnya, meskipun secara parsial dari 3 komponen produk, ada komponen “Kendala yang muncul tidak sulit untuk diatasi” serta “Evaluasi yang dilaksanakan efektif dan berhasil mendukung perbaikan” yang memiliki kesenjangan masing-masing sejumlah 20%. Artinya responden menyatakan bahwa belum sepenuhnya komponen “Kendala yang muncul tidak sulit untuk diatasi” serta “Evaluasi yang dilaksanakan efektif dan berhasil mendukung perbaikan” diproses dengan baik, meskipun kategori yang dihasilkan masih dalam kategori rendah atau hanya sebagian kecil saja. Hasil evaluasi pada aspek produk ini membuktikan bahwa hampir semua

deskripsi aspek produk terlaksana dengan baik. Artinya : 1) peserta didik mengalami kemajuan belajar setelah menerima dana BOS, terlihat dari rerata hasil belajar meningkat dari tahun sebelumnya; 2) sekolah merasa terbantu dengan adanya program BOS; 3) program BOS efektif dalam memenuhi mutu pembelajaran, hal ini nampak dari laporan kemajuan sekolah; 4) tidak banyak kendala dalam pelaksanaan program BOS disekolah terlihat dari pernyataan warga sekolah; 5) walaupun ada kendala dalam pelaksanaan program BOS segera dapat teratasi; 6) evaluasi yang dilaksanakan efektif dan berhasil mendukung perbaikan terlihat dari laporan money dana BOS; 7) program BOS memberikan dampak positif; 8) dengan adanya program BOS ini, mutu pembelajaran menjadi lebih baik hal ini terlihat dari data peningkatan capaian pembelajaran para siswanya. Dengan demikian dapat direkomendasikan bahwa program implementasi program BOS di SMP Negeri 6 Salatiga dapat diteruskan dan ditingkatkan terutama pada aspek kendala yang muncul tidak sulit untuk diatasi serta evaluasi yang dilaksanakan efektif dan berhasil mendukung perbaikan. Hasil ini sejalan dengan Juknis BOS tahun 2020 yakni pada segi pembiayaan layanan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, layanan pendidikan berbayar bagi pendidik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dirumah, pembiayaan administrasi sekolah untuk pembelian alat kesehatan. Sehingga BOS memberikan dampak positif bagi sekolah dan peserta didik.

Temuan lebih jauh bahwa implementasi BOS ditemukan bahwa pada aspek kendala yang muncul tidak sulit untuk diatasi tidak sejalan dengan apa yang ada, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah menuturkan bahwa “kebutuhan sekolah tidak tercover oleh dana BOS dan ada kendala tapi sedikit” sehingga sekolah harus pandai dalam memangemen setiap kebutuhan dengan mengelompokkan ke skala prioritas terlebih dahulu. Simpulan penelitian bahwa dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Juknis BOS diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Sumarini dengan judul Efektifitas Dana Bos terhadap Peningkatan Mutu di Madrasah mendapatkan hasil bahwa pengelolaan dana BOS sudah efektif sebab dilihat dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian pada peningkatan mutu Madrasah ditemukan dari naiknya status akreditasi yang diperoleh, jumlah siswa semakin meningkat, siswa yang mengalami ketertinggalan kelas mengalami penurunan serta angka putus sekolahpun menurun. Selain itu peningkatan prestasi yang ditorehkan peserta didik mengalami peningkatan seperti dalam memenangkan lomba sehingga dana BOS mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik dan kualitas etos kerja sekolah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Setyoko, Tunas, Sunaryo seperti telah dikutip dalam pembahasan di atas, mendapatkan hasil program BOS sudah dalam kategori baik pada efektivitasnya selain itu masih diperlukan sosialisasi program kegiatan secara rutin kepada seluruh warga pemangku kepentingan sekolah. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan Juknis yang telah diberikan oleh pemerintah, selain itu dana yang diberikan dapat membantu dan menunjang kegiatan belajar mengajar disekolah. Demikian juga penelitian sejalan dengan penelitian Soulisa seperti telah dikutip sebelumnya, memperoleh hasil bahwa tujuan dari penggunaan dana BOS sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi pada pelayanan pendidikan agar menjadi lebih baik lagi.

Analisis kesenjangan (*discrepancy*) aspek analisis manfaat biaya mencakup komponen sekolah dan orang tua peserta didik terbantu dengan program BOS, program BOS sudah efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dan kegiatan operasional sekolah berjalan lancar dengan adanya program BOS di SMP Negeri 6 Salatiga menemukan kesenjangan sebesar 11%, berada pada kategori sangat rendah. Artinya kinerja aspek analisis biaya pada SMP Negeri 6 Salatiga dalam manfaat penggunaan dana BOS sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kesenjangan di dalamnya, meskipun secara parsial dari 3 komponen analisis biaya, ada komponen “sekolah dan orang tua peserta didik terbantu dengan program BOS” yang memiliki kesenjangan sebesar 33%. Data secara tersebut menunjukkan bahwa kinerja aspek analisis manfaat biaya pada SMP Negeri 6 Salatiga terdapat kesenjangan di dalamnya, meskipun pada kategori rendah (33%). Artinya responden menyatakan bahwa belum sepenuhnya komponen sekolah dan orang tua peserta didik terbantu dengan program BOS di analisis biaya dengan baik, meskipun dalam pengkategorianntya tergolong rendah. Hasil evaluasi aspek analisis biaya ini membuktikan bahwa hampir semua deskriptor aspek analisis biaya terlaksana dengan baik. Artinya: 1) setelah program BOS ini diterapkan, keadaan sosial, dan ekonomi orang tua peserta didik menjadi lebih baik hal ini nampak dari pernyataan orang tua; 2) sekolah dan orang tua peserta didik terbantu dengan program BOS; 3) program BOS sudah efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, terlihat dari pengalokasian dana BOS dalam pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19; 4) dana program BOS berkontribusi dalam membiayai kegiatan operasional sekolah

sehingga program sekolah berjalan lancar. Dengan demikian dapat direkomendasikan bahwa program implementasi program BOS di SMP Negeri 6 Salatiga dapat diteruskan dan ditingkatkan terutama pada komponen deskriptor sekolah dan orang tua peserta didik terbantu dengan program BOS.

Kajian lebih jauh menemukan bahwa setelah program BOS ini diterapkan, keadaan sosial dan ekonomi orang tua peserta didik menjadi lebih baik, hal tersebut diperkuat dengan argumen dari Bendahara BOS menjelaskan bahwa dana BOS ini tidak memberikan pengaruh pada keadaan sosial dan ekonomi orang tua peserta didik. Selain itu Ketua Komite pada saat dilakukan wawancara yang menyatakan bahwa dana BOS yang diberikan oleh pemerintah tidak memberikan pengaruh pada keadaan sosial dan ekonomi namun setidaknya dapat membantu orang tua peserta didik dalam meringankan biaya pendidikan. Orang tua peserta didik pertama menjelaskan bahwa tingkat perkonomian dan ekonomi menjadi baik berdasarkan pola manajemen masing-masing sehingga dana BOS ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Simpulan penelitian bahwa dalam analisis biaya sesuai dengan Juknis diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan Haji, Lian, & Fitriani, yang telah dikutip sebelumnya, bahwa perencanaan program BOS dilakukan dengan pedoman RAPBS dengan penggunaannya sesuai dengan Juknis, pertanggung jawaban akan penggunaan dana BOS dalam bentuk pembelian, pemeliharaan peralatan sekolah, pembayaran Honor guru, dan manfaat dari dampak program BOS bagi sekolah ialah pembelajaran yang berlangsung berjalan secara efektif dengan meningkatkan kualitas fasilitas yang ada. Demikian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setyoko, Tunas, Sunaryo yang telah dikutip pada bagian lain, bahwa program BOS di sudah dalam kategori baik pada efektivitasnya selain itu masih diperlukan sosialisasi program kegiatan secara rutin kepada seluruh warga pemangku kepentingan sekolah. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan Juknis yang telah diberikan oleh pemerintah, selain itu dana yang diberikan dapat membantu dan menunjang kegiatan belajar mengajar disekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan kesenjangan aspek desain, instalasi, proses, produk, dan analisis manfaat biaya, sebagai hasil evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 6 Salatiga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada aspek desain, terdapat rerata kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan kondisi nyata implementasi program BOS di SMP Negeri 6 Salatiga sebesar 5%. Kesenjangan ini berada pada kategori sangat rendah. Artinya bahwa kinerja aspek desain pada SMP Negeri 6 Salatiga dalam merancang penggunaan dana BOS sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kesenjangan di dalamnya. Dari 4 komponen aspek desain, yaitu komponen hakikat dan penggunaan dana program BOS, tujuan, sasaran, dan besaran dana BOS, hanya komponen terakhir besaran dana BOS yang memiliki kesenjangan sebesar 20%.
2. Pada aspek instalasi, terdapat rerata kesenjangan sebesar 0%. Berarti sama sekali tidak ada kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan kenyataan yang terjadi secara empirik. Dengan kata lain kinerja aspek instalasi pada SMP Negeri 6 Salatiga dalam merancang penggunaan dana BOS sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kesenjangan di dalamnya. Dari 4 komponen aspek instalasi, yaitu; 1) penggunaan dana BOS diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran; 2) kondisi pandemi covid-19 penggunaan dana BOS membantu sekolah; 3) kebutuhan BOS menjadi terdeteksi melalui program BOS; dan 4) RKAS dibuat sesuai dengan juknis BOS, semuanya tidak ada kesenjangan.
3. Pada aspek proses, terdapat rerata kesenjangan sebesar 4%. Data kesenjangan ini menunjukkan kategori sangat rendah. Artinya bahwa hampir tidak ada kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan kenyataan yang terjadi secara empirik. Dengan kata lain kinerja aspek proses pada SMP Negeri 6 Salatiga dalam proses implementasi program dana BOS sudah berjalan dengan baik dan hampir tidak ada kesenjangan di dalamnya. Secara parsial, dari 5 komponen aspek proses, yaitu : 1) Pelaksanaan program BOS; 2) Pencairan dana BOS; 3) Pengawasan dana BOS; 4) Tingkat partisipasi; dan 5) Orang tua memberikan respon positif pada program BOS, hanya komponen pencairan dana BOS yang memiliki kesenjangan sebesar 20%.
4. Pada aspek produk, terdapat rerata kesenjangan sebesar 13%. Data kesenjangan ini menunjukkan kategori sangat rendah. Artinya bahwa hampir tidak ada kesenjangan antara standar yang ditetapkan

dengan kenyataan yang terjadi secara empirik. Dengan kata lain kinerja aspek proses pada SMP Negeri 6 Salatiga dalam proses implementasi program dana BOS sudah berjalan dengan baik dan hampir tidak ada kesenjangan di dalamnya. Secara parsial, dari 3 komponen aspek proses, yaitu: 1) hasil yang dicapai dari program BOS; 2) kendala yang muncul tidak sulit untuk diatasi; dan 3) evaluasi yang dilaksanakan efektif dan berhasil mendukung perbaikan. Secara parsial ada dua komponen yaitu kendala yang muncul tidak sulit untuk diatasi serta evaluasi yang dilaksanakan efektif dan berhasil mendukung perbaikan, masing-masing memiliki kesenjangan sebesar 20%.

5. Pada aspek analisis manfaat biaya, terdapat rerata kesenjangan sebesar 11%. Data kesenjangan ini menunjukkan kategori sangat rendah. Artinya bahwa hampir tidak ada kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan kenyataan yang terjadi secara empirik. Dengan kata lain kinerja aspek analisis manfaat biaya pada SMP Negeri 6 Salatiga dalam proses implementasi program dana BOS sudah berjalan dengan baik dan hampir tidak ada kesenjangan di dalamnya. Meskipun demikian, secara parsial, dari 3 komponen aspek analisis manfaat biaya, yaitu: 1) sekolah dan orang tua peserta didik terbantu dengan program BOS; 2) program BOS sudah efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran; dan 3) kegiatan operasional sekolah berjalan lancar dengan adanya program BOS, ada satu komponen, yaitu komponen sekolah dan orang tua peserta didik terbantu dengan program BOS memiliki kesenjangan sebesar 33%.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian tentang evaluasi program BOS do SMP Negeri 6 Salatiga, peneliti memberi saran rekomendasi untuk perbaikan sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak sekolah memberikan sosialisasi lebih mendalam mengenai dana BOS yang diterima oleh peserta didik, mengingat dana yang diterima hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga orang tua peserta didik lebih memahami dan informasi bisa tersampaikan dengan tepat.
2. Sekolah sudah baik dalam menggunakan dana untuk operasional sekolah, walaupun pada masa pandemi dan kebutuhan sekolah menjadi terdeteksi melalui program BOS yang diberikan pemerintah.
3. Sekolah bisa mengelola dana BOS walaupun dalam pencairannya tidak tepat waktu.
4. Kepala sekolah selaku ketua manajemen BOS dan tim bos lainnya harus memperitimbangkan serta mengatur kebutuhan yang belum terpenuhi sekolah sehingga diharapkan dalam pemenuhannya dapat direalisasikan walaupun secara bertahap.
5. Dengan adanya program BOS ini dapat meringankan beban orang tua peserta didik dalam mengakses pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadiyanto, S., & Wiyono, B. (2019). The Challenge of School Operational Assistance Management in Elementary School. *International Journal of Inovation Creativity and Change*, 5(5), 421-432.
- Haji, S., Lian, B., & Fitriani, Y. (2020). An Evaluation Of School Operational Fund Program. *International Journal of Educational Review*, 2(2), 212-221.
- Ismanto, B. (2016). Evaluation of Financing Collaboration In Improving the Quality of Primary Education. *14*, hal. 8 - 12. Atlantis Press.
- Jaedun, A. (2010). *Metode Penelitian Evaluasi Program*. Yogyakarta: Puslit Disdasmen Lemlit UNY.
- Kemdikbud. (2020, December 12). *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Dipetik 04 10, 2021, dari [Kemdikbud.go.id: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020)
- Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020, April 13). *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. (P. A. KEBUDAYAAN, Penyunt.) Dipetik April 12, 2021, dari <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/>: <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload>
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UII Press ID.
- Rubiyati, W., & Ismanto, B. (2020). Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 6(2), 220-229.

- Setyoko, Tunas, Sunaryo. (2016). Evaluation of School Operational Assistance by Using CIPP Model in Indonesia Private Islamic Elementary School. *International Journal of Managerial Studies and Research*, 4(3), 44-49.
- Soulisa. (2017). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Negeri Kecamatan Palu Timur. *Jurnal Katalogis*, 91-98.
- Sumarini. (2014). Efektifitas Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Di Madrasah. *Jurnal Edukasi*, 12(1), 83-98.
- Sumarsyah. (2020). Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Tahun 2019-2020 di Kecamatan Lubuk Basung. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 2(2), 47-56.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wirawan, M. (2015). Evaluasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 12-15.